

Kode>Nama Rumpun Ilmu:

550/ Ilmu Ekonomi

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA**

**Kajian Potensi *Virtual Currency* Sebagai Alat Pembayaran Dalam
Aspek Legalitas**



TIM PENELITIAN

Ketua : Rudi Santoso, S.Sos., M.M
NIDN : 0717107501
Anggota : Martinus Sony Erstiawan, S.E., MSA
NIDN : 0710037902
Anggota : Marya Mujayana, S.S., M.M
NIDN : 0727038201

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERKANTORAN
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA
NOPEMBER 2018**

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PROGRAM HIBAH PENELITIAN INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor : 013/ST-PPM/KPJ/VII/2018**

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Tutut Wuriyanto, M.Kom** : Kepala Bagian Penelitian & Pengabdian Masyarakat (PPM) Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, yang dalam hal ini bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Hibah Penelitian Internal Tahun Anggaran 2018 yang didanai Lembaga Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rudi Santoso, S.Sos., M.M.** : Ketua Peneliti tahun anggaran 2018. Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
PIHAK KEDUA mempunyai anggota peneliti sebagai berikut :
 - Martinus Sony Erstiawan, S.E., MSA
 - Marya Mujayana, S.S., M.M.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat dan bekerjasama untuk menyelesaikan semua kegiatan Program Hibah Penelitian Internal Tahun Anggaran 2018 Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.

PIHAK PERTAMA memberi kepercayaan dan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut sebagai ketua pelaksana program Hibah Penelitian Internal dengan judul: **"KAJIAN POTENSI VIRTUAL CURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM ASPEK LEGALITAS"**

PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan Hibah Penelitian Internal kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 6,000,000,-. Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran secara bertahap kepada PIHAK KEDUA, yaitu termin pertama sebesar 50% Rp. 3,000,000,- diberikan setelah penandatanganan surat perjanjian ini, termin kedua sebesar 20% Rp. 1,200,000,- diberikan setelah laporan kemajuan pelaksanaan dan laporan penggunaan keuangan 70% diterima oleh bagian Penelitian & Pengabdian Masyarakat (PPM), termin ketiga sebesar 30% Rp. 1,800,000,- diberikan setelah laporan akhir, seminar, *log book*, laporan keuangan dan bukti publikasi di jurnal nasional diterima oleh bagian Penelitian & Pengabdian Masyarakat (PPM).

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan tugas program Penelitian Hibah Bersaing selambat-lambatnya pada tanggal **10 November 2018**. Kelalaian atas kewajiban pengumpulan pada tanggal tersebut menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan Penelitian pada tahun berikutnya.

PIHAK PERTAMA dapat melakukan kegiatan: (1) Melakukan pemantauan, (2) Melakukan evaluasi internal, (3) Melakukan audit penggunaan anggaran. Pihak KEDUA wajib memperlancar kegiatan yang dilakukan PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA wajib Menyelesaikan:

- Laporan Kemajuan (*Progress Report*) sebanyak 2 (dua) eksemplar, paling lambat **10 September 2018**
- Seminar Laporan Akhir mulai **Oktober 2018** (Jadwal Seminar menyesuaikan).
- Laporan Akhir setelah diseminarkan dikumpulkan sebanyak 2 (dua) eksemplar, paling lambat **10 November 2018**
- Laporan Penggunaan Keuangan 100%, sebanyak 2 (dua) eksemplar, paling lambat **10 November 2018**
- Catatan Harian (*Log Book*) sebanyak 2 (dua) eksemplar, paling lambat **10 November 2018**
- *Softcopy* Laporan Akhir & Laporan Penggunaan Keuangan dalam bentuk *pdf* dikirim ke lppm@stikom.edu, paling lambat **10 November 2018**
- **Publikasi** hasil penelitian di **jurnal Nasional & Bukti** pemuatan publikasi Ilmiah, paling lambat **10 November 2018**

Demikian surat perjanjian dibuat, dipahami bersama dan dilaksanakan.

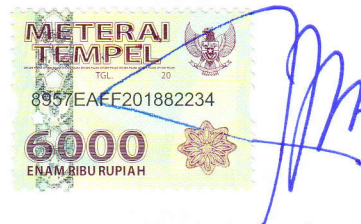
Pihak Pertama,

Surabaya, 18 Juli 2018

Pihak Kedua,



Tutut Wuriyanto, M.Kom



Rudi Santoso, S.Sos., M.M.

Kode>Nama Rumpun Ilmu:

550/ Ilmu Ekonomi

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA**

**Kajian Potensi *Virtual Currency* Sebagai Alat Pembayaran Dalam
Aspek Legalitas**



TIM PENELITIAN

Ketua : Rudi Santoso, S.Sos., M.M
NIDN : 0717107501
Anggota : Martinus Sony Erstiawan, S.E., MSA
NIDN : 0710037902
Anggota : Marya Mujayana, S.S., M.M
NIDN : 0727038201

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERKANTORAN
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA
NOPEMBER 2018**

Halaman Pengesahan
Penelitian Dosen Pemula

Judul:

Kajian Potensi *Virtual Currency* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Aspek Legalitas

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 560/Ilmu Ekonomi

Ketua Peneliti

Nama Lengkap : Rudi Santoso, S.Sos., M.M

NIDN : 0717107501

Jabatan Fungsional : -

Program Studi : Administrasi Perkantoran

No HP/Email : rudis@stikom.edu

Anggota Peneliti.2

Nama Lengkap : Martinus Sony Erstiawan, SE., MSA

NIDN : 0710037902

Perguruan Tinggi : Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya

Anggota Peneliti.3

Nama Lengkap : Marya Mujayana, S.S., M.M

NIDN : 0727038201

Perguruan Tinggi : Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya

Jangka waktu pelaksanaan : 6 Bulan

Biaya Penelitian : - Diusulkan ke Dikti : Rp. -
- Dana Internal : Rp. 6.000.000,-
- Dana Institusi Lain : Rp. -
- Inkind Sebutkan : Rp. -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Drs. Antok Supriyanto, M.MT.
NIK: 890032

Menyetujui
Kepala Lembaga Penelitian

Tri Sagirani, S.Kom., M.MT.
NIK : 970229

Surabaya, Oktober 2018
Yang Menyatakan,

Rudi Santoso, S.Sos.,M.M
NIK : 970213

Halaman Pengesahan
Penelitian Dosen Pemula

Judul:

Kajian Potensi *Virtual Currency* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Aspek Legalitas

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 560/Ilmu Ekonomi

Ketua Peneliti

Nama Lengkap : Rudi Santoso, S.Sos., M.M

NIDN : 0717107501

Jabatan Fungsional : -

Program Studi : Administrasi Perkantoran

No HP/Email : rudis@stikom.edu

Anggota Peneliti.2

Nama Lengkap : Martinus Sony Erstiawan, SE., MSA

NIDN : 0710037902

Perguruan Tinggi : Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya

Anggota Peneliti.3

Nama Lengkap : Marya Mujayana, S.S., M.M

NIDN : 0727038201

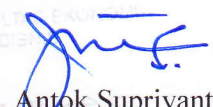
Perguruan Tinggi : Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya

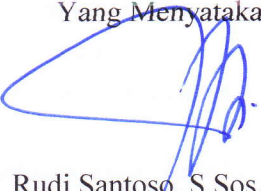
Jangka waktu pelaksanaan : 6 Bulan

Biaya Penelitian : - Diusulkan ke Dikti : Rp. -
- Dana Internal : Rp. 6.000.000,-
- Dana Institusi Lain : Rp. -
- Inkind Sebutkan : Rp. -


Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Surabaya, Oktober 2018
Yang Menyatakan,


Dr. Drs. Antok Supriyanto, M.MT.
NIK: 890032


Rudi Santoso, S.Sos., M.M
NIK : 970213

Menyetujui
Kepala Lembaga Penelitian


Tri Sagirani, S.Kom., M.MT.
NIK : 970229

RINGKASAN

Uang berfungsi sebagai alat tukar melakukan transaksi dimanapun berada. Pertukaran barang dengan barang dapat dilakukan menggunakan uang. Uang juga merupakan perantara dalam perdagangan dengan cara barter. Transaksi juga dapat dilakukan menggunakan sistem pembayaran tunai maupun Anjunagn Tunai Mandiri (ATM). Di samping itu, kita mengenal aplikasi e-banking yang memudahkan dalam transaksi hingga triliunan rupiah. Trend saat ini dan sedang hangat dibicarakan oleh orang di berbagai komunitas dan secara individu adalah pembayaran menggunakan bitcoin. Bitcoin dan Ripple merupakan salah satu tipe transaksi *currency digital* yang digunakan dalam *virtual currency/Cryptocurrency* (VC).

Bitcoin sejauh ini belum diatur secara jelas oleh Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia menghimbau tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Sejauh ini transaksi *cryptocurrency* termasuk bitcoin merupakan aset yang menggunakan *platform trading digital*. *Digital asset* merupakan aktivitas yang memiliki risiko yang cukup tinggi selain illegal dimata Bank Indonesia. Selain itu, fluktuasi naik turunnya harga yang begitu cepat dan tidak adanya analisis fundamental dalam mendukung transaksi menambah masalah sendiri.

Tujuan dalam melakukan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana menilai VC sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi. Di samping itu bagaimana peluang berkembangnya penggunaan *virtual currency* dalam sistem pembayaran. Terakhir mengkaji dan menganalisis legalitas yang mengatur sistem pembayaran menggunakan VC. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengkombinasikan riset pustaka dan studi lapangan dengan penekanan salah satunya. Hasil penelitian menunjukkan sebuah rekomendasi atas kebijakan lanjutan terkait penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran. Bank Sentral harus mengambil peran sebagai miner jika ingin terlibat di dalamnya sebagai regulator/validator. Untuk itu perlu dibuat tata aturan baru sebagai bentuk aturan lanjutan dari UU No. 7 tahun 2011. Aturan ini menekankan kepada penggunaan bitcoin untuk hal-hal yang terbatas dengan nilai kapitalisasi yang besar.

Kata Kunci: *Alat Pembayaran, Virtual Currency/Cryptocurrency, Legalitas*

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
Susunan Organisasi Tim Peneliti.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Urgensi Penelitian	5
1.4 Luaran Penelitian	6
BAB II	7
KAJIAN TEORI	7
2.1 Alat Pembayaran	7
2.2 Fungsi Uang.....	7
2.2.1 Fungsi Asli	8
2.2.2 Fungsi Turunan	8
2.3 Sistem Pembayaran	8
2.4 Komponen Sistem Pembayaran	9
2.5 Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	9
2.6 Saluran Pembayaran	10
2.6.1 Alat Pembayaran Tunai	10
2.6.2 Alat Pembayaran Non tunai	11
2.7 Kewajiban Menggunakan Rupiah	11
2.8 Uang Elektronik	12

2.9 Pembayaran Digital (<i>Virtual Currency</i>)	12
2.10 Cryptocurrency	13
BAB III.....	15
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	15
3.1 Tujuan Penelitian	15
3.2 Manfaat Penelitian	15
BAB IV	17
METODE PENELITIAN	17
4.1 Pendekatan Penelitian.....	17
4.2 Jenis Penelitian.....	17
4.3 Sumber data dan Analisis	18
4.3.1 Sumber Data.....	18
4.3.2 Metode Pengumpulan Data.....	19
4.3.3 Analisis Data.....	20
BAB V.....	25
CAPAIAN PENELITIAN.....	25
5.1 Cryptocurrency dan Regulasi.....	25
5.2 Cryptocurrency dan Risiko	29
5.3 Dampak Sistem Ekonomi dan Keuangan	35
5.3.1 Keberlangsungan Pelaku Usaha VC Dan Perlindungan Konsumen	36
5.3.2 Sistem Penyelenggaraan Pembayaran VC	39
5.4 Faktor Pembentuk Harga VC.....	43
5.5 Cost Benefit VC	45
5.5.1 Tidak Dimiliki oleh Negara Manapun.....	45
5.5.2 Demand yang Tinggi	46

5.5.3 Dikembangkan dengan Idealisme	47
5.5.4 Aman dari Pemalsuan	48
5.5.5 Sebagai Mata Uang Global	48
5.5.6 Terbebas Inflasi	49
5.5.7 Sebagai Alternatif “Investasi”	50
5.5.8 Tidak ada Rate	51
5.5.9 Pembajakan	52
BAB VI	55
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	55
6.1 Tahapan Rencana	55
6.2 Penelitian Lanjutan Kajian Perundangan Transaksi Digital Currency	55
6.3 Implementasi Rekomendasi Penelitian	55
BAB VII	56
KESIMPULAN DAN SARAN	56
7.1 Kesimpulan	56
7.1.1 Kesimpulan dan Kajian Teoritis	57
7.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN 1	61
I. INTRODUCTION	62
I. RESEARCH METHODS	64
LAMPIRAN 2	71
LAMPIRAN 3	76
URAIAN TUGAS ANGGOTA	94
BIODATA	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uang masih memiliki fungsi dan digunakan sebagai alat tukar dalam melakukan pembayaran atas transaksi. Uang juga digunakan perantara untuk pertukaran barang dengan barang, untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Transaksi yang digunakan masih menggunakan uang kartal (uang kertas dan uang logam).

Sampai dengan hari ini penggunaan Uang kartal ini masih tergolong tinggi. Data BI sampai dengan Oktober 2016 menyebutkan bahwa penggunaan uang kartal masih mencapai Rp559 triliun. Dari jumlah tersebut Rp467,5 triliun beredar di masyarakat. Sisanya, Rp. 91,5 triliun ada di perbankan. Peningkatan permintaan atau peredaran uang kartal ini bertumbuh sejak 2010, di mana pertumbuhan jumlah uang yang beredar (UYD) rata-rata mencapai 12,1%. Meski demikian, pertumbuhan tersebut masih di bawah angka historis sebelum krisis (2005-2008) yang berkisar antara 13,5% sampai dengan 26,3%. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia mencatat sepanjang tahun 2017 uang yang diedarkan mencapai Rp694,8 triliun atau meningkat dibanding 2016 yang hanya Rp612 triliun. Angka ini bertumbuh di tengah-tengah keberhasilan pemerintah dalam gerakan non tunai. Pertumbuhan dan peningkatan ini dipengaruhi oleh aktivitas politik di tahun 2017-2018 terkait pilkada. Kenaikan ini diperkirakan mencapai 10%-12% dari tahun sebelumnya. Perkiraan tersebut mencapai Rp694,8 triliun karena banyaknya agenda politik yang akan menstimulasi kegiatan ekonomi khususnya konsumsi.

Di sisi lain, BI mendorong implementasi non tunai dalam transaksi ritel (*less cash*) hingga mencapai 80%. Menurut catatan BI, pada akhir 2016, baru sekitar 58% transaksi ritel yang menggunakan transaksi non tunai. Namun melihat kondisi geografis Indonesia BI belum dapat menargetkan kapan Indonesia dapat mencapai level penetrasi transaksi non tunai sebesar 80%. Namun

semangat tersebut sudah mulai digalakkan. Salah satu program untuk meningkatkan implementasi non tunai adalah peningkatan penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Sampai dengan tahun 2016 transaksi berbasis kartu (non tunai) masih digunakan untuk tarik tunai yang mencapai Rp197 triliun atau tumbuh 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara transaksi belanja baru sekitar Rp 45,18 triliun atau 8% dari total transaksi.

Pergeseran penggunaan Uang sebagai alat transaksi pembayaran dari kartal ke non tunai sedikit banyak mengubah trend model dan metode pembayaran. Pembayaran transaksi menggunakan non tunai dipercaya sebagai metode yang sangat efisien dan juga relatif lebih aman. Sistem pembayaran menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), maupun e-banking sudah menjadi kebiasaan sebagian orang di Indonesia yang nilainya mencapai triliunan rupiah seperti yang disebutkan di atas. Salah satu trend atau model pembayaran yang saat ini sedang banyak dibicarakan orang adalah model bitcoin. Bitcoin dan Ripple merupakan salah satu tipe currency digital yang digunakan dalam *virtual currency/ Cryptocurrency* (VC).

VC adalah jenis mata uang yang pada awalnya dibuat untuk *online entertainment*. Hal yang membedakan antara *digital currency* dan *virtual currency* adalah nilai kedua mata uang ini. *Virtual currency* tidak memiliki nilai apapun karena mereka tidak diciptakan untuk digunakan di kehidupan nyata. Contoh *virtual currency* adalah *points* atau *coins* yang bisa didapatkan ketika menang bermain sebuah game dan menukar points tersebut untuk fitur-fitur tertentu di game tersebut. Ini adalah salah satu bentuk awal dari *virtual currency*. Sementara itu *Cryptocurrency* adalah sebuah bentuk uang digital yang didesain untuk menjadi sebuah mata uang yang aman dan kebanyakan *anonymous*. Ini juga merupakan mata uang yang terkait dengan internet yang menggunakan *cryptography*, yaitu sebuah proses perubahan informasi yang hampir tidak dapat dipecahkan, untuk melacak pembelian dan transfer. VC dianggap memberikan berbagai kemudahan, seperti *Bitcoin* misalnya, yang dianggap mampu mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam melakukan transfer ke luar negeri terutama dalam bentuk *remittance*. Hal ini dikarenakan transfer dilakukan secara langsung kepada

pengirim dan penerima, tanpa perantara, sehingga lebih cepat dan tidak perlu mengeluarkan fee kepada perantara. Pada tahun 2014, Bank Dunia mencatat rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk mengirim remittance sekitar 8%, dan Bitcoin mampu mengirim *remittance* dua kali lebih cepat dan 75% lebih murah.

Namun demikian, penggunaan VC ini memiliki risiko yang tinggi. Menurut Kepala Pusat Program Transformasi Bank Indonesia Onny Widjanarko menyampaikan bahwa saat ini belum ada aturan yang jelas jika masyarakat melakukan transaksi *bitcoin*. *Bitcoin* belum diatur secara spesifik oleh Bank Indonesia. Dan menghimbau agar *merchant* tidak menerima *bitcoin* sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia (Ekonomi. Kompas 2017). Hal senada disampaikan pula oleh media online yang berbeda inet.detik.com (Kusuma. 2018) bahwa Bank Indonesia memberikan peringatan kepada semua pihak agar tidak menjual, tidak menerima, membeli atau memperdagangkan *virtual currency* atau uang virtual seperti *Bitcoin*.

Aktivitas *cryptocurrency* merupakan aset yang menggunakan *platform trading* digital di Indonesia. Menurut CEO *Bitcoin* Indonesia Oscar Darmawan dalam Suheriadi (2017) menjelaskan bahwa *cryptocurrency* termasuk *bitcoin* merupakan aset yang diinvestasikan dalam bentuk digital dan sering disebut dengan digital aset. Digital aset membutuhkan *User Experience* (UX) dan *User Interface* (UI) sebagai program untuk mempermudah *merchant* menggunakan fasilitas *digital cryptocurrency* pribadi. Digital aset merupakan aktivitas yang memiliki resiko yang cukup tinggi, selain dinyatakan ilegal oleh Bank Indonesia, fluktuasi harga yang cukup beresiko tinggi bagi para *merchant* (investor). Tidak adanya informasi yang berupa analisis fundamental naik turunnya harga dalam *cryptocurrency*. Tidak adanya regulasi yang baik yang diatur pemerintah atau lembaga otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran.

Apabila salah satu tipe *cryptocurrency* merupakan alat pembayaran digital yang sah dapat membuat masyarakat kesulitan dalam melakukan transaksi keuangan. Karena itu dibutuhkan mekanisme, prosedur, kebijakan, langkah-langkah yang konkrit dari segala sisi untuk perkembangan alat pembayaran dalam bentuk digital. Untuk itu diperlukan penelitian secara intens dan mendalam guna

menilai dampak baik dari sisi sosial, mikro dan makro ekonomi dan serta segala kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Seperti dikatakan Joko Widodo Presiden Republik Indonesia dalam rangkaian acara Dies Natalis Universitas Indonesia yang dikutip melalui media online detikfinance (2018) bahwa *Blockchain* dan *Cryptocurrency* mata uang tanpa bank central yang sekarang sedang ramai diperebutkan banyak orang. Indonesia harus siap menghadapi perkembangan zaman yang begitu cepat.

Sementara itu belum ada mekanisme legal yang mengatur sistem pembayaran menggunakan VC tersebut. Bahkan BI dengan tegas melarang penggunaan VC ini sebagai alat pembayaran. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang merupakan uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Kontradiksi antara trend dan kebutuhan ini tentu saja menimbulkan masalah sendiri. Di satu sisi pemerintah mendorong upaya peningkatan penggunaan non tunai, di sisi lain sistem pembayaran yang sedang trend tersebut belum mempunyai dasar hukum yang jelas. Hal ini juga berdampak kepada risiko terkait masalah hukum yang ditimbulkan di antaranya adalah penggunaan VC terutama *bitcoin* rawan sebagai ladang *money laundry*, pelanggaran pajak, dan kejahatan keuangan lainnya.

Potensi pelanggaran hukum yang terjadi dalam transaksi VC bisa dilihat dari sistem alirannya. Berdasarkan alirannya, VC dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu *closed (non convertible)*, *open with one flow direction* dan *convertible*. VC yang bersifat *closed* biasa digunakan dalam dunia games online dimana uang tersebut tidak bisa secara langsung digunakan untuk membeli barang dan jasa di dunia nyata, walaupun praktik tersebut ada namun tidak dilegalkan oleh providernya dan biasanya berakibat sanksi berupa penutupan akun oleh administrator. VC yang bersifat *open with one flow direction* adalah seperti *Facebook Credit*, *Nintendo Poin* yang penggunaanya hanya terbatas untuk barang/jasa yang disediakan oleh provider dan sirkulasi serta regulasinya diatur

oleh provider. Sedangkan untuk convertible VC, adalah VC yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa di dunia nyata dan juga dapat ditukarkan dengan fiat currency. *Convertible* VC bisa dibagi menjadi dua yaitu bersifat *centralized* dan *decentralized*.

Centralized apabila memiliki otoritas atau administrator pusat yang berperan seperti bank sentral dalam dunia perbankan sedangkan *decentralized* yaitu sebaliknya, ketika tidak ada administrator pusat yang berfungsi sebagai intermediary, transaksi yang terjadi diverifikasi oleh para pengguna dari VC itu sendiri. Contoh dari VC adalah *Bitcoin* yang merupakan VC dengan kapitalisasi market terbesar. Sebagai alternatif pemecahan masalah masyarakat pengguna sistem pembayaran VC tetap melakukan kegiatan aktivitas transaksi, dengan aturan yang masih belum tersedia dari Bank Indonesia dan secara otomatis resiko yang diambil dalam melakukan transaksi cukup besar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pembayaran digital apabila menggunakan *virtual currency* di masa depan serta potensi risikonya sehingga dapat diketahui kelayakan dan penerapan penggunaan *virtual currency* dalam sistem pembayaran di masyarakat.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan utama yaitu

- 1) Bagaimana penilaian masyarakat terhadap perkembangan sistem pembayaran *virtual currency* jika digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi?
- 2) Bagaimana aspek legalitas yang mengatur sistem pembayaran menggunakan *Virtual Currency*?

1.3 Urgensi Penelitian

- 1.) Dapat mengkaji bagaimana menilai *virtual currency* sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi

BAB IV

METODE PENELITIAN

A Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penekanan dalam penelitian ini yaitu kepada analisis proses kesimpulan komparasi serta analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Azmar, 2001). Dalam penelitian kualitatif, garis besar antara setiap langkah/tahap penelitian lebih fleksibel. Hal ini berarti langkah-langkah tersebut tidak bergerak secara linear di mana satu tahap selesai satu hari kemudian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun dalam model ini peneliti dapat kembali ke tahap-tahap sebelumnya selama proses penelitian berlangsung sesuai kebutuhan dan kreatifitas peneliti (Efferin, Darmadji, & Yang, 2006).

B Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perkembangan sistem pembayaran virtual currency digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana aspek legalitas yang mengatur sistem pembayaran menggunakan Virtual Currency. Penelitian pustaka atau kajian pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan dan bahan lain saja yang memerlukan riset lapangan (Mestika, 2004).

Secara ideal, penelitian akan menggunakan kombinasi riset pustaka dan riset lapangan dengan penekanan kepada salah satu diantaranya. Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih menekankan kepada pendekatan studi pustaka. Sementara riset lapangan dilakukan kepada objek penelitian atau nara sumber yang dipilih yang mempunyai kriteria yang sesuai. Beberapa alasan menggunakan metode studi pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Persoalan penelitian dalam kajian ini hanya bisa dijawab lebih detail dengan melalui studi pustaka; 2) Keterbatasan penelitian dari objek pelaku pengguna VC yang masih sangat terbatas; 3)

Kajian studi pustaka diperlukan sebagai salah satu tahap sendiri, yaitu pendahuluan (*preliminary research*) untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau masyarakat.

Penelitian ini akan memaparkan argumentasi penalaran keilmuan hasil dari kajian pustaka. Di samping itu analisis peneliti dan olah pikir mengenai suatu masalah atau topik kajian akan dituangkan dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, garis batas antara setiap langkah/tahap penelitian lebih fleksibel. Hal ini berarti langkah-langkah tersebut tidak bergerak secara linear di mana satu tahap selesai tuntas baru kemudian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun dalam model ini peneliti dapat kembali ke tahap-tahap sebelumnya selama proses penelitian berlangsung sesuai kebutuhan dan kreatifitas peneliti (Efferin, Darmadji, & Yang, 2008).

Desain studi penelitian kualitatif dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Desain Studi Penelitian Kualitatif

Research Question	Sumber Data, Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Aspek-Aspek Praktis	Justifikasi
Sumber : (Efferin, Darmadji, & Yang, 2008)			

4.1.1 Sumber data dan Analisis

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

4.1.1.1 Sumber Data

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Sedangkan Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013).

Sumber kajian pustaka berasal dari skripsi, tesis, disertasi, makalah, paper, jurnal penelitian, buku literature, situs internet yang kredibel dan dapat bertanggungjawabkan, dan sebagainya. Pemilihan sumber pustaka dilakukan

untuk menghasilkan kutipan ataupun ide-ide yang tepat, dengan berdasarkan kriteria sumber pustaka diantaranya:

- 1.) Kesesuaian topik penelitian yang dilakukan
- 2.) Pemahaman isi yang mudah dicerna dan dipahami
- 3.) Pernyataan dalam sumber yang diperoleh dapat dibuktikan secara empiris dan terpercaya
- 4.) Sumber pustaka, terorganisir sehingga lebih mudah dalam mencari yang dibutuhkan. Kesesuaian perkembangan teknologi dan perkembangan zaman berdasarkan kesesuaian teori yang terbaru.

Berikut ini adalah sumber data primer dalam penelitian ini:

- 1) Sumber Data Primer:
 - a. Pelaku usaha atau miner.
 - b. Pemegang bitcoin.
 - c. Masyarakat umum
 - d. Pejabat Bank Indonesia
 - e. Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 2) Sumber Data Sekunder adalah sebagai berikut:
 - a. *Cryptocurrency Saving Privacy in Digital Age (Special Reference to Thane Region); International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS).*
 - b. *Issues of Regulation of the Use of Cryptocurrency in The Russian Federation. FinTech and RegTech: Possibilities, Threats and Risk of Financial Technologies.*
 - c. Kajian atas *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Indonesian Journal on Networking and Security* - Volume 6 No 1 – 2017.

4.3.2 Metode Pengumpulan Data

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam bentuk dokumen yang berhubungan dengan VC. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan sumber data yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diperoleh informasi yang dibutuhkan.
2. Observasi, teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang akan diteliti pada waktu terjadinya kejadian yang akan diteliti pada waktu terjadinya kejadian sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih objektif diteliti.
3. Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penyelidikan melalui sumber dokumen, baik yang terjadi di masa lampau maupun di masa sekarang.

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Moleong, 2007) metode ini akan mengamati secara seksama aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan yang akan diteliti dengan menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang akan terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode depth interview dalam pengumpulan data. Model ini dilakukan dengan bertemu secara langsung dengan (tatap muka) dengan narasumber. Narasumber yang akan dijadikan sebagai responden sejumlah 8 (delapan) narasumber. Dari jumlah tersebut terdiri atas: 2 (dua) pelaku usaha miner, 2 (dua) pemegang bitcoin (investor), 1 (satu) pejabat Bank Indonesia, 1 (satu) pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan 2 (dua) dari masyarakat umum. Dalam pengamatan ini, peneliti akan melakukan observasi dan pengamatan selama periode penelitian yaitu bulan Mei – Agustus 2018.

4.3.3 Analis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Moleong, 2007) metode ini akan mengamati secara seksama aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan yang akan diteliti dengan menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang akan terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini menganalisa data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

A. *Content Analysis*

Metode ini digunakan untuk menganalisis potensi *Virtual Currency* dalam hal ini adalah Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam aspek legalitas. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan, dalam identifikasi, kategorisasi, kemudian dilanjutkan interpretasi.

B. Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu memang demikian adanya (Arikunto, 2013). Peneliti tidak akan mengubah apapun yang ada di dalam sumber utama maupun sekunder. Peneliti hanya membaca, menjelaskan dengan cara deskriptif, dan kemudian menyimpulkan sebagaimana aslinya.

Setelah peneliti melakukan *depth interview* kepada 8 (delapan) orang sumber data primer, hasil *depth interview* akan diolah menjadi transkrip wawancara. Metode pengolahan data wawancara dengan pola *verbatim transcription*. Dalam metode ini peneliti akan mengubah seluruh hasil wawancara menjadi bentuk naskah (transkrip) secara detil. Analisa data dimulai dengan *content analysis* yaitu mengkodekan semua transkrip hasil wawancara dengan memasukkan setiap kalimat yang mengandung kata atau maksud yang sama dalam suatu kode yang sama. Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan pengamatan langsung dan melakukan analisa berbagai sumber data sekunder terkait penelitian ini yang list datanya sudah disampaikan sebelumnya. Kegiatan ini akan membantu menyediakan informasi tambahan dan memverifikasi data yang diperoleh dari *depth interview*.

Setelah tahapan *content analysis* selesai, maka peneliti akan melakukan deskripsi data yang telah dikumpulkan. Peneliti tidak akan mengubah apapun yang ada di dalam sumber primer maupun sumber data sekunder. Peneliti hanya

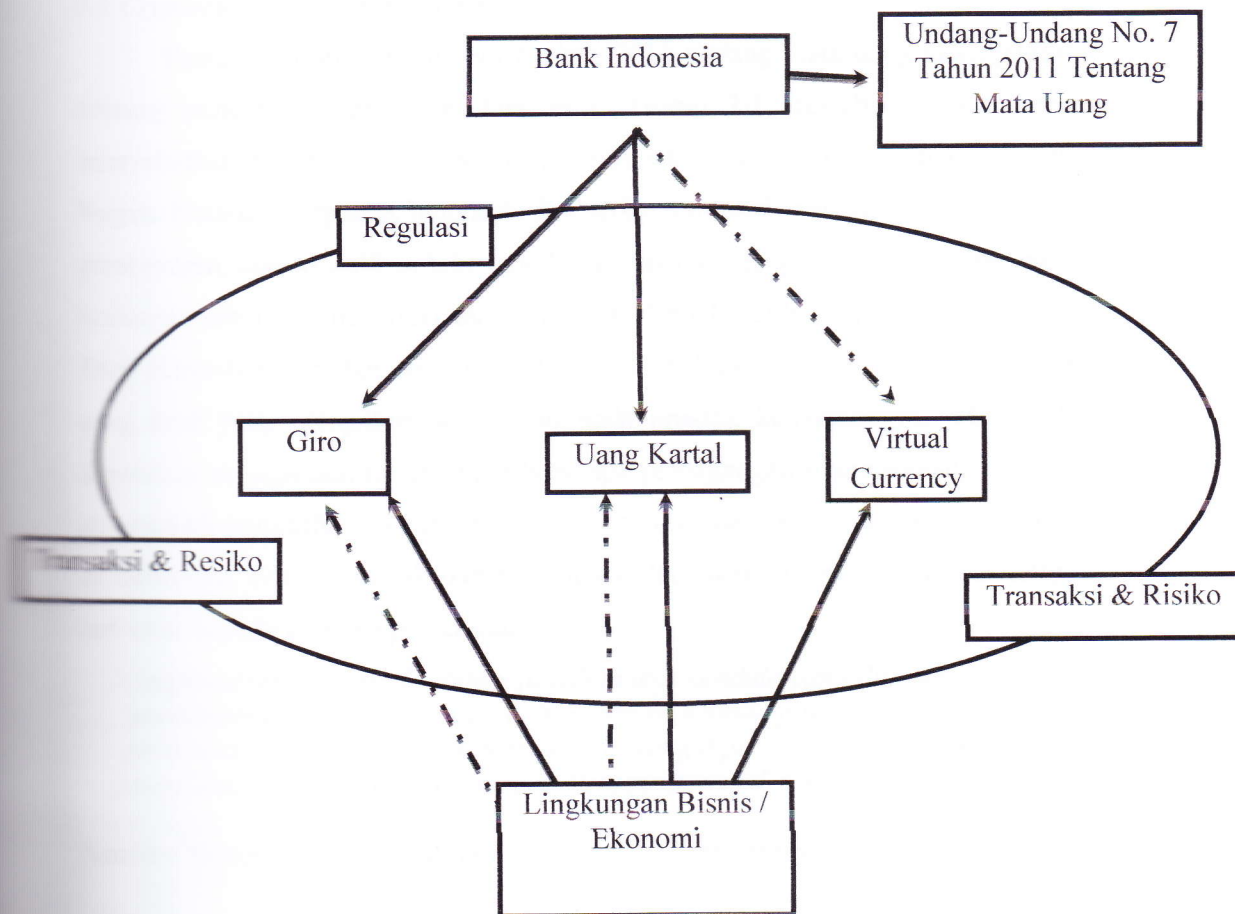
membaca, menjelaskan dengan cara deskriptif, dan kemudian menyimpulkan sebagaimana aslinya.

Tabel 4. 2 Ringkasan Desain Penelitian Kualitatif

Research Question	Sumber Data, Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Aspek-Aspek Praktis	Justifikasi
Pertanyaan Pembuka 1. Bagaimana pandangan Anda terhadap Virtual Currency (VC) dalam hal ini adalah Bitcoin (BTC)? 2. Apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam kategori VC? 3. Kapan pertama kali VC dikenalkan di Indonesia? 4. Bagaimana perkembangan VC di Indonesia?	Dari Pelaku/Investor: Responden: a. General Manager Indodax-Surabaya. b. General Manager Blockchain Zoo-Jakarta Observasi: Aktivitas sehari-hari	Mendapatkan akses melalui kenalan, kolega, mengajukan surat permohonan resmi. Interview dengan tatap muka dan hampir semua responden direkam menggunakan alat perekam	Manajer atau karyawan yang ditunjuk dalam strategi pemasaran Virtual Currency dalam hal ini bitcoin. Pengamatan langsung dan analisis dokumen menyediakan informasi tambahan dan memverifikasi data yang diperoleh dari interview.
Pertanyaan Inti 1. Berapa kapitalisasi VC di Indonesia? 2. Apa cost benefit menggunakan VC dalam transaksi dan perdagangan? 3. Apa risiko yang paling berat dalam dunia VC? 4. Bagaimana cara menanggulangi risiko yang terdampak dari VC? 5. Jika dikaitkan dengan UU No. 7 tahun 2011 tentang mata Uang, dimana VC dalam hal ini BTC tidak (belum) diakui sebagai mata uang atau alat tukar, bagaimana pandangan Anda tentang ini? 6. Terkait poin 9, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang VC atau BTC jika mengalami masalah dalam bertransaksi menggunakan alat tukar tersebut? 7. Jika VC dalam hal ini BTC mempunyai kapitalisasi yang besar, apakah bisa berdampak atau berpengaruh terhadap ekonomi keuangan negara?	Analisis Dokumen: Berbagai dokumen terkait bitcoin dan mekanismenya. Dari luar perusahaan: a. Pelaku atau pemegang Bitcoin. b. Analisis dokumen: Sumber-sumber tertulis tentang bitcoin sebagai alat pembayaran. Analisis dokumen: Peneliti menggunakan deskriptif kualitatif	Participant observation di perusahaan: Observasi dilakukan mulai bulan Juni-Agustus 2018. Participant observation di perusahaan: Observasi dilakukan mulai bulan Juni-Agustus 2018.	Responden masyarakat umum yang memegang bitcoin dan dapat memberikan informasi tentang persepsi umum dan memberikan gambaran baik positif maupun negative atas bitcoin sebagai alat pembayaran.

<p>8. Mekanisme transaksi BTC peer to peer meniadakan fungsi Bank Sentral dalam hal validasi. Bagaimana mekanisme atau jaminan keamanan dalam hal ini?</p> <p>9. Bagaimana seharusnya fungsi Bank Sentral dalam mekanisme transaksi BTC?</p> <p>10. Jika sifatnya peer to peer, perlukah sebuah regulasi dalam bentuk perundangan baru untuk mengatur lalu lintas transaksi BTC?</p>			
<p>Pertanyaan Penutup</p> <p>1. Fenomena BTC saat ini tidak bisa dibendung, menurut Anda bagaimana perkembangan ke depan?</p> <p>2. Apa yang harus dilakukan oleh Negara untuk mengantisipasi masalah yang akan timbul?</p> <p>3. Bagaimana seharusnya pelaku bisnis maupun masyarakat harus bersikap untuk mengantisipasi perkembangan selanjutnya?</p>			

4.4 Kerangka Konseptual



Sumber : Peneliti

- 2.)Mengkaji dan menganalisis peluang berkembangnya virtual currency sebagai alat pembayaran
- 3.)Mengkaji dan menganalisis legalitas sistem pembayaran *virtual currency*.
- 4.)Sebagai rekomendasi bagi Bank Indonesia dalam mengkaji sistem pembayaran menggunakan *virtual currency*.

1.4 Luaran Penelitian

NO	JENIS LUARAN	INDIKATOR CAPAIAN
1	Publikasi di Jurnal Nasional	Ekonomi
2	Pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah	
3	Nasional	Submit
	Lokal	Tidak Ada
4	Buku Ajar	Tidak Ada
5	Luaran Lainnya (jika ada) Jurnal Internasional	Tidak Ada
6	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	Tidak Ada

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan semangat positif dari para pelaku bisnis dalam hal transaksi keuangan. Semangat positif ini berkaitan dengan efisiensi yang diberikan jika menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran. Namun beberapa catatan yang dapat dirangkum adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kontradiktif antara semangat pemanfaatan mata uang ini dan regulasi yang berlaku. Negara melalui Kementerian Keuangan dan Bank Sentral secara tegas melarang penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi digital atau virtual. Hal ini membuat pelaku pasar atau pemegang bitcoin terpapar risiko atas tidak dijaminnya oleh pemerintah asset digital yang dimilikinya.
2. Risiko penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dan digital asset masih sangat tinggi. Hal ini terkait dengan fluktuasi nilai tukar bitcoin yang terlalu tinggi. Disamping itu tidak adanya underlying asset sebagai dasar nilai tukar bitcoin semakin menambah “gelap” harganya.
3. Bitcoin tidak/belum mempengaruhi system perekonomian makro/mikro. Hal ini karena sifat bitcoin yang sangat independen yang tidak melibatkan bank sentral sebagai pihak ketiga sebagai validator. Namun demikian, jika kapitalisasi bitcoin semakin tinggi, akan mempunyai dampak terhadap ekonomi makro/mikro.
4. Faktor pembentuk harga bitcoin masih banyak dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Selain itu, pemain besar dalam hal ini pemegang bitcoin dalam jumlah besar sera agen, bisa mengubah nilai tukar bitcoin sekehendak mereka.
5. Keuntungan penggunaan bitcoin dapat digunakan di manapun. Ia tidak dimiliki oleh negara manapun sehingga praktis tidak terpengaruh oleh kondisi perekonomian maupun konstelasi politik di negara manapun.

Selain itu bitcoin dikembangkan dengan kemandirian sehingga tingkat kehati-hatian dan integritas pemiliknya dapat dipertanggungjawabkan.

6. Bitcoin juga merupakan salah satu mata uang yang terbebas dari “hantu” inflasi karena sifatnya yang nyaris terbebas atas ekonomi makro/mikro.
7. Bitcoin dapat digunakan sebagai alternative investasi. Hal ini terkait dengan nilai tukarnya yang cenderung naik. Disamping itu permintaan yang tinggi dibandingkan dengan ketersediaannya, membuat asset digital ini adalah salah satu virtual currency yang paling banyak dicari.

7.1.1 Kesimpulan dan Kajian Teoritis

Bitcoin bisa dijadikan sebagai alternatif pembayaran bisa diaplikasikan dari sisi mekanisme. Hal ini sejalan apa yang dituangkan dalam peraturan perbankan bahwa sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Dari sisi prinsip efisiensi, bitcoin sangat memenuhi karena bitcoin mampu memangkas biaya remittance sampai 75% dengan kecepatan transfer dua kali lipat dari metode biasa.

Namun dari sisi komponen, bitcoin belum memenuhi unsur legalitas atau tingkat hokum yang melegitimasi penggunaannya. Tata aturan yang ada justru menghambat perkembangan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal ini kurang produktif dengan semangat pemerintah untuk meningkatkan volume penggunaan non tunai dalam system pembayaran.

Kontra produktif lainnya adalah berkenaan dengan surat Edaran dari Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah RI. Surat edaran ini menganut asas teritorial bahwa setiap transaksi yang dilakukan di wilayah RI baik yang dilakukan oleh penduduk dan bukan penduduk harus menggunakan rupiah.

7.2.1 Kesimpulan

Penggunaan bitcoin harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya risiko yang terpapar. Pemegang bitcoin harus tahu dan memahami betul

bagaimana mekanisme transaksi dan risikonya. Asas legalitas yang melegitimasi penggunaan alat pembayaran ini harus diatur kemudian ke dalam bentuk perundangan baru yang bukan merupakan amandemen dari peraturan perundangan yang sudah ada. Peraturan perundangan yang mengatur ini juga tidak kontra produktif dengan aturan yang berlaku sebelumnya.

Bank Sentral bisa ikut terlibat di dalamnya jika kapitalisasi dan volume Bitcoin sudah mencapai ambang batas yang bisa mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung makro/mikro ekonomi. Kehadiran BI yang berperan sebagai mining dalam lalu lintas bitcoin bisa menerapkan perannya sebagai Bank Sentral yang mengawasi transaksinya. Untuk itu diperlukan perangkat hukum dan infrastruktur yang mendukung. Jika hal tersebut diterapkan, tidak menutup kemungkinan praktik pencucian uang, pendanaan aksi terorisme dan kejahatan lainnya bisa diminimalisir dengan pemantauan aliran Bitcoin dan virtual currency lainnya.